

# **PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM (Perspektif Pendidikan Transformatif antara Kenyataan dan Harapan)**

Oleh: Muhammad Toriqularif\*

## **Abstrak**

Di Indonesia, sudah semestinya pendidikan dikembangkan sesuai kebutuhan objektif, visioner dan didasarkan atas falsafah tujuan negara. Pendidikan harus diurusutamai oleh menyatunya pendidikan dengan persoalan sosial yang tengah digumuli masyarakat dan memberikan perspektif masa depan. Pendidikan yang demikian dibaca sebagai satu entitas sosial yang diletakkan dalam kerangka besar transformasi masyarakat Indonesia. Dalam suasana sistem pendidikan yang ada sekarang ini, rasanya Indonesia masih berada di persimpangan jalan. Di satu sisi ada arah untuk membangun pendidikan yang *community based*, berorientasi proses dan memungkinkan pengembangan hingga ke arah pendidikan transformatif (dengan kerja sangat keras?), akan tetapi di sisi yang lain, masih ada elemen aturan yang berorientasi hasil dan sentralistik seperti Ujian Nasional dengan segala dampak implementasinya.

**Kata Kunci:** Pendidikan Islam, Pendidikan Transformatif

### **A. Pendahuluan**

Hubungan si kuat dan si lemah memang selalu menjadi perbincangan menarik dalam konteks apapun. Apalagi jika menyangkut hubungan antar negara atau bahkan antara satu bagian dunia dengan belahan bumi lainnya. Tentu perspektif yang dapat dibangun pun semakin

---

\*Penulis adalah Dosen Tetap STAI Al-Falah Banjarbaru.

beraneka ragam, bergantung pada *positioning* dan sudut pandangnya.

Dunia Barat dan Timur beberapa abad terakhir mewakili posisi si kuat dan si lemah, yang superior dan yang inferior dalam panggung kehidupan dunia. Bagaimana kolonialisme Barat atas Timur dalam bentuknya yang paling primitif mewarnai panggung sejarah selama empat abad sampai dengan pertengahan abad XIX Masehi.

Kolonialisme dianggap telah berakhir dengan merdekanya daerah jajahan dan terbentuknya negara-negara baru, termasuk Indonesia. Penjajahan pun disepakati sebagai sesuatu yang haram dalam tata pergaulan dunia baru yang didasarkan pada hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Akan tetapi bagi sebagian kalangan, kolonialisme itu belum berakhir, justru sedang makin menggurita dalam modelnya yang baru. Yaitu bentuk-bentuk penjajahan ideologis, politis, ekonomis, sosial dan bahkan kultural. Tanda dari *neo-kolonialisme* ini adalah mengentalnya orientasi kebarat-baratan, sikap inferior dan mengekor dalam benak masyarakat bekas jajahan. Masyarakat ini mengalami kegamangan dan mempersepsikan dirinya, hanya merasa baik jika telah seperti orang Barat.<sup>2</sup>

Akar persoalan global ini adalah kolonialisme baru, yang tidak hanya diaktori oleh orang Barat sebagai penjajahnya, tetapi disuburkan pula oleh orang Timur yang menjadi penguasa, yang belum siap untuk menjadi tuan rumah di negerinya sendiri dan atas dirinya sendiri. Mereka

---

<sup>1</sup>Sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh karenanya penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan keadilan....

<sup>2</sup>Mufti Ali, *Dari Kritisisme Poskolonialisme dan Transformatif Menuju Orientasi Baru Paradigma Pendidikan*, <http://muftiali.multiply.com>.

selalu (atau dengan terpaksa) menoleh ke Dunia Barat yang lebih *maju* dan *gemerlap*.

Sehingga menjadi suatu keharusan untuk membangun kesadaran kritis dalam masyarakat bekas jajahan itu, mendorong kebanggaan mereka dengan identitas mereka sendiri dan mencapai kemajuan dalam versi mereka sendiri. Yang salah satu (utama)nya harus dibangun dalam bidang pendidikan, guna membentuk kesadaran budaya baru yang menyetarakan dirinya di dalam pergaulan bangsa-bangsa.<sup>3</sup>

### **B. Problem Paradigmatik Pendidikan Negara Bekas Jajahan (Indonesia)**

Pendidikan di negeri-negeri bekas jajahan memang masih amat memprihatinkan, orientasi yang tidak jelas, ketercerabutan dari akar budaya dan pemanfaatannya sebagai mesin politik adalah salah satu penyakit akut yang menggerogotinya. Lebih jauh ini juga dapat dilihat sebagai eksek dari penjajahan.

Sebagaimana di Indonesia, politik pendidikan penjajahan Belanda pada masa itu memberlakukan dualisme (membedakan anak Belanda dan inlander), memperlambat adanya sekolah di atas sekolah dasar bagi Inlander (graduasi), adanya prinsip konkordansi yang menghilangkan nuansa lokal, sistem kontrol ketat dari pemerintah kolonial, lemahnya perencanaan dan orientasi pada pendidikan pegawai.<sup>4</sup>

Ketika negara jajahan itu mencapai kemerdekaannya, negara itu tidak dapat seketika melepaskan diri dari pengaruh suasana penjajahan, tidak juga di dunia pendidikan, ciri, pola dan bahkan materi pelajaran masih sama dengan masa kolonial tersebut. Secara tidak sadar,

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>S. Nasution, *Sejarah pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 145-146.

sebuah proses kolonialisasi gaya baru sedang berlangsung, anak-anak negeri yang baru merdeka itu tetap terjajah secara psikologis.<sup>5</sup> Di tambah lagi, ketika kehidupan politik belum matang, pendidikan kerap pula dijadikan sebagai wahana indoktrinasi, untuk mengukuhkan regim yang berkuasa.

### **Pengalaman Indonesia**

Pendidikan di Indonesia sejak semula belum mendapat tempat yang cukup terhormat dalam berbagai regim pemerintahan yang pernah ada. Malah fungsi pendidikan dalam kehidupan kenegaraan pun mengalami pergeseran seiring perguliran regim penguasa.<sup>6</sup> Di masa Orde Lama, ketika politik menjadi punggawa, maka pendidikan lebih merupakan alat indoktrinasi, daripada alat untuk membawa masyarakat pada kesejahteraan hidup. Pada masa Orde Baru, sekali lagi pendidikan menjadi alat politik untuk menyeragamkan pola pikir dan bertindak rakyat. Segala sesuatunya dicekoki dari atas dan kebhinnekaan nyaris diingkari. Pada masa ini, pemikiran masyarakat harus seragam dan selebihnya mereka hanya dicetak sebagai tukang-tukang.<sup>7</sup>

CE. Beeby yang pernah menjadi konsultan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) pada tahun 1970-1974 menganggap bahwa departemen ini sangat miskin. Ia menceritakan bahwa anggaran pendidikan pada masa itu hanya 3,4% dari seluruh anggaran pembangunan Indonesia. Pada Pelita II prosentase itu baru naik menjadi

---

<sup>5</sup>Mufti Ali, *Dari Kritisisme Poskolonialisme dan Transformatif Menuju Orientasi Baru Paradigma Pendidikan*.

<sup>6</sup>Terlebih lagi pendidikan agama Islam bahkan ketika itu pendidikan Islam nyaris terpinggirkan juga dianggap menyusahkan dan dianaktirikan.

<sup>7</sup>HAR. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Bandung; Rhineka Cipta, 2000), h. 1-5.

9% seiring peningkatan penerimaan devisa negara akibat booming harga migas dunia pada masa itu.<sup>8</sup>

Menilik prosentase yang sedemikian rendah ini, maka dapat disimpulkan bahwa perhatian terhadap sektor ini pada masa itu memang jauh dari memadai. Dapat dimaklumi bahwa pemerintah kala itu lebih berkonsentrasi pada persoalan ekonomi dengan pendekatan efek bola salju. Sehingga regim yang berkuasa mengembangkan pandangan bahwa, kemajuan di bidang ekonomi akan membawa pula kemajuan di bidang pendidikan.

Belum lagi ditataran praktis, pendidikan menyajikan materi yang sangat berorientasi Barat, kurikulumnya didominasi sains positivistik dan pembelajaran pun terutama hanya ditujukan sebagai wadah *transfer of knowledge*, sekolah menjadi penjara bagi peserta didik yang ditekan sedemikian rupa.<sup>9</sup>

Kehidupan kenegaraan yang terkomando di segala bidang juga berlaku pada dunia pendidikan. Kurikulum disusun sedetail-detailnya oleh Departemen Pendidikan dan kebudayaan, buku pelajaran yang boleh digunakan diterbitkan oleh negara, guru pun dibina dalam penataran-penataran yang indoktrinatif. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan pada masa itu hanya diartikan sebagai kesediaan untuk masuk sekolah pada waktunya dan kerelaan ketika assetnya dirampas negara untuk didirikan sekolah-sekolah negeri.<sup>10</sup>

Ketika struktur kehidupan sentralistik yang dibangun Orde Baru itu mengalami krisis dan kemapanan yang dibangun sepanjang orde goyah, mulailah orang berpaling

---

<sup>8</sup>CE. Beeby, *Pendidikan di Indonesia, Penilaian dan Pedoman Pelaksanaan*, (Jakarta; LP3ES, 1982), h. 5-6.

<sup>9</sup>Teddy Suryana, *Merancang Pendidikan Transformatif*, <http://www.indonesia.com>

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 164-165.

pada dunia pendidikan. Perhatian itu pun bersegi-segi, ada yang menjadikannya sebagai kambing hitam dengan menyatakan bahwa, sekian banyak kelemahan bangsa pada dasarnya karena gagalnya pendidikan nasional, ada yang lebih positif, mengajak semua pihak untuk memperhatikan sektor yang selama ini dianaktirikan ini sembari berharap ada reposisi dan reaktualisasi Pendidikan Nasional.

### **C. Pendidikan Transformatif, Perspektif Indonesia**

Tujuan dari proses pendidikan selalu berkaitan dengan persoalan zamannya, oleh karena itu ketepatan arah pendidikan berkaitan dengan pengenalan dan pemahaman atas permasalahan zaman.<sup>11</sup> Setiap proses pendidikan yang dilepaskan dari konteks permasalahan zamannya (dan masyarakatnya), hanya akan menghasilkan out put yang tidak siap pakai dan bahkan tidak berguna. Pun juga pendidikan yang hanya ditujukan pada satu aspek saja dari persoalan masyarakatnya, semisal tuntutan pasar tenaga kerja saja, keluarannya tidak akan pernah menjadi bagian solusi yang sebenarnya bagi masyarakat itu.

Bahkan sebagai sebuah keseluruhan proses, pendidikan yang sedemikian itu tidak dapat responsif terhadap dinamika dan perubahan sosial yang kompleks. Pendidikan itu tidak dirancang untuk menjawab tantangan secara komprehensif dan akan mengalami stagnasi.<sup>12</sup>

Secara konseptual, dikenal adanya pembagian paradigma pendidikan menjadi konservatif-liberal-kritis. Paradigma konservatif bercorak fatalistik, berangkat dari asumsi bahwa ketidaksederajatan manusia adalah keharusan, bagian dari hukum alam. Sehingga perubahan sosial adalah

---

<sup>11</sup>M. Djumberansyah Indar, *Filsafat Pendidikan*, (Surabaya: Karya Abditama, 1994), h. 85-86.

<sup>12</sup>Teddy Suryana, *Merancang Pendidikan Transformatif*.

disharmoni yang hanya akan menimbulkan kesengsaraan. Yang harus dilakukan manusia adalah menerima *pandhum* mereka dengan sabar dan menunggu giliran menurut roda kehidupan, dalam harmoni dan dalam kepasifan. Pendidikan dalam lingkup paradigma ini mengutamakan pengetahuan teknis untuk menjadi bagian fungsional masyarakatnya.<sup>13</sup>

Paradigma liberal berakar dari paham liberalisme yang individualistik, menyadari permasalahan sosial, tidak pernah mempermasalahkan sistem dan menekankan kemampuan individu untuk bertahan sekaligus bersaing dalam situasi perubahan sosial apapun, dengan kesadaran untuk tetap memelihara stabilitas jangka panjang. Pendidikan dalam paradigma ini, mensosialisasikan dan mereproduksi tata nilai, susila, keyakinan dan nilai dasar agar stabil berfungsi baik dalam masyarakat, dan di sisi lain menyiapkan peserta didik sebagai bagian dari sistem.<sup>14</sup>

Paradigma kritis tidak memandang struktur kehidupan yang ada sebagai sebuah kemapanan, sehingga pendidikan ditujukan bagi rekonstruksi masyarakat sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapinya. Dalam perspektif ini, pendidikan membuka wawasan dan cakrawala pikir peserta didik untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara bebas dan kritis diri dan struktur dunianya dalam rangka transformasi sosial.<sup>15</sup> Bagi paradigma ini, nilai yang dimapkan adalah nilai-nilai dasar fundamental yang diyakini peserta didiknya.<sup>16</sup>

Tiga paradigma yang dikonsepsikan Paulo Freire ini, menurutnya-sebagaimana dikutip Ashari Cahyo Edi-

---

<sup>13</sup>Ashari Cahyo Edi, *Pendidikan Transformatif*, <http://www.jurnalyics.tripod.com>

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Hanafie, Menuju Paradigma Pendidikan Islam Transformatif, <http://www.hanafie.tl>

menciptakan tiga bentuk kesadaran yang berbeda; paradigma konservatif menghasilkan kesadaran magis, tidak mampu melihat kaitan satu faktor dengan faktor lainnya, semisal antara kemiskinan dengan struktur sosio politik dan budaya. Paradigma liberal melahirkan kesadaran naif, yaitu senantiasa melihat aspek diri (manusia) sebagai akar penyebab masalah masyarakat. Sedangkan paradigma kritis sebaliknya mengkonstruksikan kesadaran kritis, yang memandang masalah bersumber dari aspek yang luas, dari diri hingga sistem dan struktur.<sup>17</sup> Paradigma pendidikan kritis transformatif berusaha menyiapkan peserta didiknya untuk mampu melibatkan diri dalam proses transformasi sosial yang menyeluruh, termasuk dalam hal ini melakukan kritisasi terhadap struktur kehidupan sosial guna menciptakan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik.

Mengutip Colin Lanksear dkk., Hanafie merumuskan ciri pendidikan kritis-transformatif sebagai berikut:

1. Pendidikan pada dasarnya merupakan bentuk kritik sosial dan kultural, bahwa semua pengetahuan adalah produk sejarah.
2. Eksistensi seseorang sangat terkait dengan masyarakat yang lebih luas, baik lingkup keluarga, masyarakat atau lembaga pendidikan.
3. Fakta sosial tidak pernah terpisahkan dari ranah nilai. Yaitu upaya pembangunan kesadaran kritis atas fakta dan nilai.
4. Bahasa merupakan pusat bagi formasi subyektivitas.
5. Perbedaan status dalam masyarakat adalah akibat *previlege* dari pihak lain (yang bisa saja tidak adil).

---

<sup>17</sup>Ashari Cahyo Edi, *Pendidikan Transformatif*.

6. Permasalahan dalam masyarakat tidak bisa dipandang hanya dari satu sisi saja, pasti berkaitan dengan beberapa aspek lainnya.

### **Konteks Indonesia**

Di Indonesia, sudah semestinya pendidikan dikembangkan sesuai kebutuhan objektif, visioner dan didasarkan atas falsafah tujuan negara. Pendidikan harus diurusutamai oleh menyatunya pendidikan dengan persoalan sosial yang tengah digumuli masyarakat dan memberikan perspektif masa depan. Pendidikan yang demikian dibaca sebagai satu entitas sosial yang diletakkan dalam kerangka besar transformasi masyarakat Indonesia.<sup>18</sup>

Setelah sedemikian lama pendidikan Indonesia bersifat sangat tertutup dan sentralistik, melalui UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mulai membuka kran pelibatan masyarakat dan penghargaan atas kebhinnekaan.<sup>19</sup> Kurikulum sebagai fondasi dari proses pendidikan<sup>20</sup> juga memberikan peran yang cukup besar bagi guru dan pelaku pendidikan di lapangan untuk mengembangkannya dalam koridor standar isi yang bersifat nasional. Sebuah peluang yang disertai dengan beban teramat berat, karena guru selama ini tidak pernah diposisikan sebagai pengembang kurikulum, akan tetapi hanya sebatas pelaku pembelajaran di lapangan.<sup>21</sup>

Dalam pandangan Agus Suwignyo, implementasi kurikulum di Indonesia selama ini belum menekankan

---

<sup>18</sup>Teddy Suryana, *Merancang Pendidikan Transformatif*.

<sup>19</sup>Lihat Departemen Pendidikan Nasional, UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, utamanya pasal-pasal 8, 9 36, 54, 55, 56, dll.

<sup>20</sup>Moh Yamin, *manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2010), h. 48.

<sup>21</sup>E. Mulyasa, *Implementasi KTSP, Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 179-180.

kemandirian dan pengembangan multidimensi individu. Gejala ini terasa benar dengan meluasnya sikap ketidakpedulian, wawasan lingkungan yang sempit, minimnya pengenalan geografi negara, tergerusnya bahasa Indonesia oleh bahasa *gaul*, sepihnya character building dan sebagainya.<sup>22</sup>

Dalam suasana sistem pendidikan yang ada sekarang ini, rasanya Indonesia masih berada di persimpangan jalan. Di satu sisi ada arah untuk membangun pendidikan yang *community based*, berorientasi proses dan memungkinkan pengembangan hingga ke arah pendidikan transformatif (dengan kerja sangat keras?), akan tetapi di sisi yang lain, masih ada elemen aturan yang berorientasi hasil dan sentralistik seperti Ujian Nasional dengan segala dampak implementasinya.

Betapapun para pakar berupaya mengkonsepsikan, agar KTSP menjadi pintu bagi Kurikulum yang transformatif,<sup>23</sup> akan tetapi semua tetap kembali pada bagaimana guru, peserta didik, pengawas dan Dinas-Dinas Pendidikan di lapangan cukup memiliki komitmen untuk itu.

Metode pembelajaran yang menyenangkan semakin sering disosialisasikan kepada para guru belakangan ini, demikian pula issue pendidikan karakter. Akan tetapi aplikasi ditingkat lapangan masih sedemikian lemahnya,

---

<sup>22</sup>Agus Suwignyo, *Kurikulum dan Politik (kebijakan) Pendidikan*, dalam *Kurikulum Yang Mencerdaskan, Visi 2030 dan pendidikan Alternatif*, (A. Ferry T. indratno, ed), (Jakarta: Kompas, 2007), 41-42

<sup>23</sup> Yang kemudian saat ini telah berkembang menjadi K13, Lihat Moh Yamin dalam bukunya *Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*, memasukkan satu Bab khusus untuk membahas bagaimana merancang Kurikulum Transformatif. Lihat Moh Yamin, *manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*, h. 151-202.

apalagi lebih jauh mencari pola penanaman kesadaran identitas dalam aplikasi kurikulum.<sup>24</sup>

Dari sisi ini, ide pendidikan transformatif tersebut tampak belum tersemaikan benar pada para guru di lapangan. Nyaris tidak ada Kepala Sekolah, Pengawas dan para pejabat lain yang berwenang melakukan supervisi dan pembinaan yang menekankan kepada guru untuk mengembangkan pembelajaran dengan paradigma pendidikan transformatif.

Alih-alih, desentralisasi pendidikan banyak disalahgunakan para penguasa lokal untuk kepentingan politik masing-masing. Jika dulu pusat yang memanfaatkan pendidikan untuk indoktrinasi, kini penguasa daerah melakukan hal yang sama dalam bentuk yang lain; meliburkan sekolah untuk peringatan Hari Ibu, yang mengenalkan istri Bupati yang akan maju Pilkada yang akan datang, ada buku dengan gambar Calon Bupati/Gubernur *incumbent* dan sebagainya. Ini menambah daftar hitam carut-marut pendidikan Indonesia.

#### **D. Kesimpulan**

Paradigma pendidikan transformatif terutama dibutuhkan negara berkembang dan bekas jajahan dalam rangka meneguhkan jati diri kebangsaannya dan menghindarkan diri dari ancaman neo kolonialisme. Paradigma pendidikan ini akan membangun kemandirian

---

<sup>24</sup>Istilah kesadaran identitas banyak digunakan Agus Suwignyo dan A. Ferry T. Indarto untuk menunjuk pada kemampuan dan proses memahami perubahan jati diri terkait cara berfikir, kemandirian dan orientasi pribadi (aspek internal psikologis), serta posisi, peran dan tanggung jawab sosial individu (aspek eksternal sosiologis) peserta didik. Lihat Agus Suwignyo, *Kurikulum dan Politik (kebijakan) Pendidikan*.

bangsanya dan mempercepat perkembangan bangsa karena menumbuhkan kritisisme konstruktif pada generasi muda.

Paradigma ini dapat terimplementasi dalam sistem pendidikan apapun, dengan syarat sistem itu terbuka, tetapi hanya akan menemukan keberhasilannya, jika ide itu tersemayamkan dengan baik hingga lapis terbawah dan mewarnai gerak langkah setiap elemen pendidikan.

Ada semangat untuk menuju ke arah pendidikan transformatif di Indonesia khususnya pendidikan Islam, walau bersifat embriotik. Tetapi di sisi lain, masih tersembul ambiguitas dan kurang seriusnya implementasi di lapangan. *Wa Allah A'lam bi al-Shawab.*

## Daftar Pustaka

- Ali, Mufti, *Dari Kritisisme Poskolonialisme dan Transformatif Menuju Orientasi Baru Paradigma Pendidikan*, <http://muftiali.multiply.com>
- Beeby, CE., *Pendidikan di Indonesia, Penilaian dan Pedoman Pelaksanaan*, Jakarta; LP3ES, 1982.
- Departemen Pendidikan Nasional, UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
- Edi, Ashari Cahyo, *Pendidikan Transformatif*, <http://www.jurnalyics.tripod.com>
- Hanafie, *Menuju Paradigma Pendidikan Islam Transformatif*, <http://www.hanafie.tl>
- Indar, M. Djumberansyah, *Filsafat Pendidikan*, Surabaya: karya Abditama, 1994.
- Indratno, A. Ferry T. (ed), *Kurikulum Yang Mencerdaskan, Visi 2030 dan pendidikan Alternatif*, Jakarta: Kompas, 2007.
- Mulyasa, E., *Implementasi KTSP, Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Nasution, S., *Sejarah pendidikan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Suryana, Teddy, *Merancang Pendidikan Transformatif*, <http://www.indonesia.com>

Tilaar, HAR., *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Bandung: Rineka Cipta, 2000.

Yamin, Moh, *manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*, Yogyakarta: DIVA Press, 2010.